

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian Islam di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kehadiran lembaga keuangan syariah dan juga unit usaha syariah diharapkan mampu menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dengan negara saat ini, baik dibidang sosial, ekonomi, politik serta budaya masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya waktu peredaran lembaga keuangan syariah semakin populer di masyarakat, salah satunya adalah *Baitul Mal wa Tanwil* (BMT) yang hadir sebagai salah satu bentuk Unit Usaha Syariah yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang sangat harmonis diantara keduanya. Hal inilah yang menjadi keunggulan yang dimiliki oleh BMT dibandingkan dengan Unit usaha Konvensional lainnya.¹

Baitul Maal wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : KENCANA. 2015), hal.315

tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan ber;andaskan syariat islam.

Pengaturan mengenai BMT mangacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaanya BMT tunduk pada Peraturan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya BMT. Berdasarkan aturan hukum Indonesia, badan hukum untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP).²

BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional. Keberadaan BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi praktek penerapan bunga pinjaman yang mengakibatkan masyarakat harus terjerumus dalam permasalahan ekonomi. *Baitul Mal Wa Tamwil* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 31

menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian. Dengan demikian BMT harus mampu menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.

Dalam menjalankan usahanya BMT sebagai lembaga intermediary antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal, BMT memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil tentunya dana yang dimiliki pihak lembaga harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perputaran dana berpengaruh terhadap pendapatan laba suatu lembaga. Jika banyak simpanan yang mengendap di BMT tentunya hal tersebut dapat mengurangi tingkat profitabilitas BMT. Profitabilitas juga mempengaruhi nisbah bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik modal dan anggota simpanan di BMT tersebut.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati.³ Tentunya BMT memiliki berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota maupun calon anggota diantaranya pembiayaan

³ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 215

mudharabah, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, dan lain sebagainya.

Di dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota tidak selalu berjalan lancar, banyak risiko yang dihadapi pihak BMT. Salah satu risiko pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana pihak peminjam teridikasi tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian pihak lembaga. Kredit macet akan mempengaruhi tingkat kecukupan modal yang digunakan untuk kegiatan operasional lembaga. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko dari pembiayaan yang didapat dari rasio total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan.

Ditinjau dari perspektif Islam setiap usaha dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Setiap lembaga bisa merencanakan kegiatan usaha, namun tidak bisa memastikan apa yang akan didapatkan dari usaha yang telah dilakukan. Usaha tersebut bisa mendatangkan keuntungan ataupun kerugian. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Ketidakpastiaan itu sama halnya dengan risiko yang akan dihadapi dari usaha yang dilakukan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 34⁴:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal.

Dalam ayat tersebut secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang mengetahui apa yang akan terjadi besok atau apa yang akan diperolehnya. Manusia hanya dapat merencanakan untuk hari esok, namun tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Dalam suatu usaha akan ada risiko yang harus dihadapi. Risiko tidak dapat dihindari namun risiko dapat diminimalisir. Suatu lembaga keuangan memiliki risiko dalam hal pembiayaan. Modal yang disalurkan kepada anggota pembiayaan memiliki risiko dalam pengembaliannya.

Banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan, di Trenggalek sendiri *Baitul maal wa tamwil* (BMT) sudah berkembang pesat diantaranya KSSPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah. Dalam hal pembiayaan kedua BMT tersebut tidak luput dari permasalahan kredit macet (*Non performing Finance*). Pembiayaan yang disalurkan kepada anggota tentunya

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30, (Bandung: Hila, 2010) juz 21, hal. 655.

memiliki resiko dalam pengembalian. Pertumbuhan tingkat *Non performing Finance* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Tingkat NPF di BMT PETA dan BMT Berkah Trenggalek⁵

No	Tahun	KSPPS BMT PETA Trenggalek	Kopsyah BMT Berkah Trenggalek
1	2017	7,1%	6,8%
2	2018	5,5%	8,3%
3	2019	8,5%	9,7%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat *Non performing Finance* (NPF) di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek selama 5 tahun mengalami fluktuasi. NPF KSPPS BMT PETA mulai tahun 2017-2019 mengalami naik turun yang cukup signifikan, tahun 2017 nilai NPF 7,1%. Satu tahun berikutnya di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,5%, tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 8,7%. Nilai *Non performing Finance* Kopsyah BMT Berkah dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mulai dari 2017 dengan tingkat NPF 6,8%, kemudian di tahun 2015 naik menjadi 4,1%, tahun 2018 turun menjadi 8,3%, tahun 2019 naik kembali menjadi 3,9%, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 9,7%.

⁵ Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Nurhadi selaku Manager BMT PETA pada tanggal 25 November 2019 dan hasil wawancara dengan Bapak Yoko Yuhono selaku Manager BMT Berkah pada tanggal 27 November 2019

Banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat *Non performing Finance* (pembiayaan bermasalah). Ada 2 faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal berasal dari pihak lembaga itu sendiri, faktor internal diantaranya kurangnya evaluasi keuangan, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, kesalahan dalam perhitungan modal kerja, dan kesalahan dalam penaksiran jaminan. Faktor eksternal berasal dari nasabah itu sendiri, diantaranya karakter nasabah tidak amanah, Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, usaha yang dijalankan relatif baru, dan terjadinya musibah.⁶

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) merupakan risiko dari pembiayaan yang terdapat faktor penyebabnya. Dalam lembaga keuangan pembiayaan bermasalah sudah menjadi dasar permasalahan yang sulit untuk dihalangkan. Lembaga sudah melakukan berbagai strategi pengendalian internal dalam penanganan pembiayaan dan pengawasan didalam pembiayaan tersebut. Strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan menggunakan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), untuk menilai pemberian kelayakan pembiayaan kepada anggota. Lembaga juga melakukan pengawasan dalam pemberian pembiayaan dengan cara melakukan survei untuk menilai kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan.

⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 102-103

Berbagai cara pengendalian internal sudah diterapkan pihak lembaga guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Pemberian pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dengan menilai kelayakan dan karakter anggota pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dari karakter nasabah yang tidak amanah. Faktor eksternal sulit untuk dikendalikan, sehingga masih tinggi tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Dalam lembaga syariah anggota pembiayaan dianggap sebagai mitra, jadi untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara yang tepat sehingga tidak membebankan anggota dan tidak merugikan pihak lembaga. Dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah memiliki kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara Restrukturisasi Pembiayaan. Dari keterangan yang dikutip dari Rachamadi Usman disebutkan bahwa :

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Restrukturisasi dilakukan agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya melalui cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*).⁷

⁷ Rachamadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.218

Berikut ini data dari restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah selama periode 2017-2019.

Tabel 1.2

Jumlah Anggota Restrukturisasi di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah
BMT Berkah Trenggalek

Nama Lembaga	Tahun	<i>Rescheduling</i>	<i>Reconditioning</i>	<i>Restructuring</i>	Total Anggota
KSPPS BMT PETA	2017	18	8	2	28
	2018	20	10	2	32
	2019	23	14	1	38
Total		61	32	5	98
Kopsyah BMT Berkah	2017	20	8	2	30
	2018	21	12	2	35
	2019	25	14	3	42
Total		66	34	7	107

Sumber : Wawancara penelitian di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek⁸

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan Restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dari tahun 2017 menuju 2018 hingga 2019 dengan jumlah *rescheduling* yang paling banyak penerapannya. Restrukturissai pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 38 pembiayaan

⁸ Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Nurhadi selaku Manager BMT PETA pada tanggal 24 Agustus 2020 dan hasil wawancara dengan Bapak Yoko Yuhono selaku Manager BMT Berkah pada tanggal 25 Agustus 2020

bermasalah yang dapat diselesaikan dengan restrukturisasi. Dan untuk Kopsyah BMT Berkah dari tahun 2017 menuju 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan yang cukup stabil. Kenaikan terbesar pada tahun 2019 dengan jumlah 42 pembiayaan bermasalah yang dapat diselesaikan dengan restrukturisasi pembiayaan.

Paparan data dari Restrukturisasi pembiayaan yang ada di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek memiliki disparatis yang hampir sama. Dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di kedua lembaga tersebut. Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek memiliki strategi penanganan yang tepat yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Jika dilihat dari data yang diperoleh dari KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek memiliki angka restrukturisasi pembiayaan yang cukup tinggi. Restrukturisasi pembiayaan efektif dalam mengurangi angka pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

Produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Produk pembiayaan di KSPPS BMT PETA yaitu Pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan dengan asas jual beli. BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Produk pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek yaitu Pembiayaan *Murabahah* yang

merupakan akad akad jual beli dimana pihak BMT Berkah memberikan modal sebagai alat dalam usaha anggota pembiayaan. Dengan sistem bagi hasil antara BMT dengan anggota pembiayaan. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan oleh anggota atau calon anggot secara kredit atau angsur setiap bula

Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul, “Studi Komparasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi di Baitul Maal Wa Tamwil PETA dan Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?

4. Bagaimana persamaan dan perbedaan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?
5. Manakah strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yang lebih baik dalam penerapannya antara KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti tentang penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
2. Untuk meneliti tentang kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
3. Untuk meneliti tentang cara mengatasi kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
4. Untuk meneliti persamaan dan perbedaan penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

5. Untuk meneliti mana yang lebih baik dalam penerapan penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi antara KSPPS BMT PETA Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan modal yang diberikan dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal dan peminjam modal. Keuntungan dari kegiatan lembaga keuangan atau BMT diperoleh dari selisih antara bagi hasil yang diterima oleh BMT dari dana atau modal yang dipinjamkan kepada anggota peminjam dengan bagi hasil yang dibayarkan kepada anggota penabung atau dari pihak pemberi modal dikurangi biaya operasional. Dalam penyaluran pembiayaan akan ada risiko dalam pengembaliaanya. Salah satu risiko pembiayaan yaitu kredit macet. Untuk sebuah risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi pengendalian internal pembiayaan bermasalah. Meskipun sudah menerapkan pengendalian risiko pembiayaan, pada kenyataannya pembiayaan bermasalah tetap menjadi permasalahan dasar pada suatu lembaga keuangan. Sehingga untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah diperlukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Hanya membahas tentang penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi saja.
2. Hanya membahas kendala dan solusi dalam penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi saja.

3. Hanya membahas tentang persamaan dan perbedaan dari penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi di dua lokasi penelitian saja.
4. Hanya menyimpulkan dari kedua lokasi penelitian mana yang lebih baik dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang bisa memberikan bukti empiris tentang studi strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Serta Penelitian juga diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan Bank Syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dapat digunakan sebagai media informasi dan dapat dijadikan tolak ukur, apakah dalam penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode menggunakan restrukturisasi sudah diterapkan secara maksimal atau belum.
- b. Bagi akademis

Upaya untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam dan memberikan tambahan informasi mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

c. Bagi Praktisi

Upaya untuk mendukung pengendalian dan penanganan pembiayaan yang bermasalah di KSPPS BMT PETA cabang Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

d. Bagi Masyarakat

Upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

e. Bagi Penelitian yang akan Datang

Untuk meneliti lebih luas dan mendalam tentang penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Definisi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang dikutip dari Muhamad

Ridwan :

Baitul Maal Wa Tamwil atau *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada fungsi dan peran lembaga dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang memiliki fungsi dalam upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumbr dana sosial yang lain. *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah Balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-*

tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁹

b. Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” artinya “taktik, ilmu yang menggunakan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam berperang, langkah-langkah yang disusun untuk berperang”.¹⁰

c. Penanganan

Penanganan adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

d. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitas pengembaliannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.¹¹

e. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya lembaga dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut yang

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.126

¹⁰ Emzul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Difa Publisher), hal.774

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.66

dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.¹²

2. Definisi Operasional

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko dari penyaluran pembiayaan. Dalam setiap pembiayaan tidak semua berjalan dengan lancar, pasti ditemukan pembiayaan bermasalah didalamnya. Pengendalian internal dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko dari pembiayaan. Pihak lembaga dapat melakukan berbagai strategi dalam pengendalian internal, tetapi tidak dapat mengendalikan faktor eksternal dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah menjadi pokok permasalahan yang sulit dikendalikan. Dalam setiap lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek tentunya memiliki strategi dalam penanganan masalah tersebut. Penanganan pembiayaan bermasalah yang tidak membebani bagi anggota, dengan melakukan struktur ulang pembiayaan (*restrukturisasi*). Kebijakan restrukturisasi pembiayaan dapat menyelamatkan pembiayaan bermasalah, sehingga anggota yang mengalami permasalahan dalam pengembalian pembiayaan dapat kembali menggansur pembiayaan.

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank* ,.....,hal.69

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi mengenai keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

1. Bagian awal

Bagian awal meliputi: Halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

Pada bagian ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah dari penulisan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian mengenai tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat Penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian, dan Penelitian terdahulu.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat pemaparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan dalam rumusan masalah dan hasil data. Berisi hasil wawacara (informasi dari pihak yang diwawancarai) serta penjelasan informasi lain-lain yang sudah terkumpul.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang kaitan antar pola, kategori dan dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dari temuan teori yang diungkapkan dilapangan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini : (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.